

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG- UNDANG PERAMPASAN ASET (Prespektif Komparatif)

Oleh
Fikri Haykal

Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan merampas dan menjual aset-aset terpidana untuk mengembalikan keuangan negara. Namun dalam proses perampasan aset terkadang terpidana sudah tidak mempunyai aset yang dimiliki karena terpidana sudah mengalihkan asetnya kepada pihak lain. Karena dalam proses perampasan aset tersebut hanya dapat dirampas setelah ada putusan hakim yang bersifat *inkracht*. Waktu proses peradilan sampai putusan *inkracht* inilah yang dapat digunakan oleh terdakwa mengalihkan asetnya. Maka Rancangan Undang-Undang Perampasan memberikan model yang berbeda dalam perampasan aset yang dalam prosesnya tidak memerlukan putusan hakim untuk merampas aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, dalam proses perampasan aset diperlukan pembuktian terbalik untuk memastikan aset tersebut merupakan hasil atau berasal dari tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, bagaimana sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di negara Singapura, dan Amerika Serikat.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian yang bersifat pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain (kurang lebih sama). Adapun data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Akademisi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Melalui metode ini pertama-tama data diatur dan disusun secara sistematis agar menjadi kesatuan peristiwa yang utuh sehingga dapat dipelajari secara mendalam.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan formulasi pembuktian terbalik tindak pidana korupsi pada perampasan aset diatur dalam BAB III Hukum Acara Perampasan Aset. Pembuktian terbalik ini berlaku bagi seseorang yang menguasai aset yang diblokir atau disita oleh penyidik atau orang merasa dirugikan atas kepemilikan aset dengan mengajukan keberatan kepada penyidik yang melakukan pemblokiran atau penyitaan permohonan tersebut diajukan secara tertulis, pada saat persidangan orang yang mengajukan keberatan atau perlawanan wajib membuktikan bahwa harta tersebut tidak terkait atau berasal dari tindak pidana. Selanjutnya Perampasan aset di Singapura menitik beratkan pada perampasan manfaat hasil tindak pidana korupsi dan diajukan setelah terdakwa di putus bersalah. Manfaat hasil korupsi tersebut di rampas berdasarkan permohonan jaksa penuntut umum setelah ada putusan pengadilan. Perampasan aset di Amerika Serikat terkait dengan perampasan aset atau properti yang terlibat atau hasil dari suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Perampasan aset ini tidak mensyaratkan proses pidana atau pemidanaan terlebih dahulu.

Pemerintah dan DPR seharusnya sudah dapat mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Ketentuan terkait perampasan manfaat hasil tindak pidana seharusnya dirumuskan lebih detail sebagai aset yang dapat dirampas menggunakan RUU Perampasan Aset ini. Metode perampasan aset yang digunakan di Singapura dan Amerika Serikat sebagaimana yang sudah termuat dalam RUU Perampasan Aset, seharusnya dapat menjadi perhatian penting oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal membuat pembaharuan hukum.

Kata kunci: Perampasan Aset, Pembuktian Terbalik, Korupsi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF POLICY FORMULATION OF REVERSE EVIDENCE FOR CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN THE DRAFTING OF ASSET CONFIGURATION LAW (Comparative Perspective)

By

Fikri Haykal

Returning state losses can be done by confiscating and selling the convict's assets to restore state finances. However, in the process of confiscation of assets, sometimes the convict no longer has any assets because the convict has transferred his assets to another party. Because in the process of confiscation these assets can only be confiscated after a judge's decision is inkracht. The time from the judicial process until the inkracht decision is what the defendant can use to transfer his assets. So the Confiscation Draft Law provides a different model for confiscating assets, the process of which does not require a judge's decision to confiscate assets suspected of being related to a criminal act. In addition, in the process of confiscating assets, reverse proof is required to ensure that the assets are the result of or originate from criminal acts of corruption. The problem in this research is how to reverse proof of criminal acts of corruption in the Draft Asset Confiscation Law, what is the system of reverse proof of criminal acts of corruption in Singapore and the United States.

The problem approach used in this research is through comparative research. The comparative approach is one of the methods used in normative research to compare one legal rule with another (more or less the same) legal rule. The data was obtained through literature study and through interviews using written guidelines with predetermined sources. The resource persons for this research consisted of legal academics at the Faculty of Law, University of Lampung, prosecutors at the Lampung High Prosecutor's Office. To analyze the data in this research, the author will use the Qualitative Descriptive method. Through this method, the data is first arranged and arranged systematically so that it becomes a complete event so that it can be studied in depth.

The results of the research and discussion show that the policy for formulating reverse evidence for criminal acts of corruption in asset confiscation is regulated in CHAPTER III of the Asset Confiscation Procedural Law. This reverse proof applies to someone who controls assets that are blocked or confiscated by an investigator or a person who feels disadvantaged over the ownership of assets by submitting an objection to the investigator who carried out the blocking or

Fikri Haykal

confiscation. The application is submitted in writing At the time of trial, the person who files an objection or opposition is obliged to prove that the assets are not related to or derived from a criminal act. And confiscation of assets in Singapore focuses on confiscating the benefits of criminal acts of corruption and is proposed after the defendant is found guilty. The benefits of the proceeds of corruption were confiscated based on the request of the public prosecutor after a court decision. Asset forfeiture in the United States is related to the confiscation of assets or property involved in or resulting from a criminal act, including criminal acts of corruption. Confiscation of these assets does not require criminal proceedings or punishment first.

The government and DPR should be able to pass the Asset Confiscation Bill into law to maximize returns to state finances resulting from criminal acts, especially corruption. Provisions related to confiscation of benefits from criminal acts should be formulated in more detail as assets that can be confiscated using this Asset Confiscation Bill. The asset confiscation methods used in Singapore and the United States, as contained in the Asset Confiscation Bill, should be an important concern for Law Enforcement Officials in terms of making legal reforms.

Keywords: Confiscation of Assets, Reverse Evidence, Corruption.